

**ANALISA DAN EVALUASI
SITUASI KAMTIBMAS DAN KAMTIBCAR LANTAS
KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU BULAN FEBRUARI 2019**

I. PENDAHULUAN

1. Dasar
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 - b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2009 tentang Sistem Pelaporan Gangguan Kamtibmas;
 - c. Surat Telegram Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : ST / 677 / XII / 2009 tanggal 21 DESEMBER 2009 tentang pemberlakuan aplikasi Sistem Pelaporan Gangguan Kamtibmas pada Perkap Nomor 7 tahun 2009 TMT 1 Maret 2010;
 - d. Surat Telegram Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : STR / 01 / I / 2002 tanggal 23 JANUARI 2002 tentang keseragaman bentuk laporan Anev;
 - e. Laporan Anev Bulanan Satker/Satwil Jajaran Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dari Tanggal 01 s/d 28 FEBRUARI 2019.
2. Maksud dan Tujuan
 - a. Maksud
Laporan Bulanan ini disajikan untuk memberikan gambaran tentang perkembangan situasi Gangguan Kamtibmas di Wilayah Kepolisian Daerah Kepulauan Riau beserta Jajarannya pada periode Bulan FEBRUARI dari tanggal 01 s.d 28 FEBRUARI 2019.
 - b. Tujuan
Untuk mengetahui kejadian-kejadian yang perlu mendapatkan perhatian guna mengambil langkah – langkah / kebijaksanaan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan rutin Kepolisian Daerah Kepulauan Riau sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang di wilayah Kepolisian Daerah Kepulauan Riau berikut jajarannya.

3. Ruang Lingkup

- a. Data gangguan kamtibmas yang terjadi pada bulan *FEBRUARI 2019*;
- b. Data Crime Indeks yang terjadi pada bulan *FEBRUARI 2019*;
- c. Data Poleksosbud dan Laka Lantas dan Pelanggaran lantas bulan *FEBRUARI 2019*;
- d. Jumlah kejahatan menurut golongan pada bulan *FEBRUARI 2019*;
- e. Data kasus menonjol yang terjadi pada bulan *FEBRUARI 2019*.

4. Tata Urut

- I. PENDAHULUAN
- II. PERKEMBANGAN GANGGUAN KAMTIBMAS, POLEKSOSBUD DAN LAKA LANTAS
- III. KASUS MENONJOL
- IV. ANALISA DAN EVALUASI
- V. PENUTUP

II. PERKEMBANGAN GANGGUAN KAMTIBMAS

5. Data gangguan Kamtibmas bulan *FEBRUARI 2019*

- a. Perbandingan data Jumlah tindak pidana berdasarkan Crime Clock bulan *JANUARI 2019* dan *FEBRUARI 2019*, adalah sebagai berikut :

Tabel 1

NO	URAIAN	2019		TREN	
		JAN 2019	FEB 2019	5	6
1	2	3	4	5	6
1	CRIME TOTAL	332	302	-30	-9%
2	CRIME CLEARED	202	169	-33	-16%
3	CLEARENCE RATE	61%	56%	-5%	
4	CRIME RATE	16 ORG	15 ORG	-1 ORG	
5	CRIME CLOCK	2 ⁰ 10 ^{''} 12'	2 ⁰ 23 ^{''} 04'	TURUN 13 MENIT 32 DETIK	

- b. Perbandingan Jumlah TINDAK PIDANA Bulan *JANUARI 2019* dan *FEBRUARI 2019*, adalah :

Tabel 2

NO	KESATUAN	2019						TREN (%)			
		JANUARI 2019			FEBRUARI 2019						
		JTP	PTP	%	JTP	PTP	%	JTP	%	PTP	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	POLDA KEPRI	18	22	122	19	11	58	1	6	-11	(50)
2	RESTA BRLG	220	119	54	206	117	57	-14	(6)	-2	(2)
3	RES TPI	48	39	81	29	24	83	-19	(40)	-15	(38)
4	RES KRMN	27	21	78	28	16	57	1	4	-5	(24)
5	RES NTN	2	0	0	4	0	0	2	100	0	0
6	RES BTN	11	1	9	13	1	8	2	18	0	0
7	RES LGG	5	0	0	2	0	0	-3	(60)	0	0
8	RES ANAMBAS	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		332	202	61	302	169	56	-30	(9)	-33	(16)

c.Trend. . .

- c. Trend Perkembangan Kejahatan menurut penggolongannya pada bulan *JANUARI 2019* dan *FEBRUARI 2019* adalah :

Tabel 3

NO	URAIAN	2019				TREN			
		JAN 2019		FEB 2019		JTP	%	PTP	%
		JTP	PTP	JTP	PTP				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GOL. I KEJAHATAN									
1	KONVENSIONAL	214	101	227	103	13	6%	2	2%
2	TRANS NASIONAL	43	47	19	22	-24	-56%	-25	-53%
3	THDP KEKAYAAN NEGARA	3	2	7	0	4	133%	-2	-100%
4	BERIMPLIKASI KONTINJENSI	0	0	0	0	0	0%	0	0%
5	PELANGGARAN HAM	20	12	10	9	-10	-50%	-3	-25%
6	PELANGGARAN HKM N TP	0	0	0	0	0	0%	0	0%
7	PELANGGARAN HKM PDN	40	26	22	18	-18	-45%	-8	-31%
8	GANGGUAN THDP ORANG	12	14	17	17	5	42%	3	21%
9	GANGGUAN THDP BARANG	0	0	0	0	0	0%	0	0%
10	GANGGUAN THDP FASUM	0	0	0	0	0	0%	0	0%
11	GANGGUAN THDP HEWAN	0	0	0	0	0	0%	0	0%
12	GANGGUAN THDP L HIDUP	0	0	0	0	0	0%	0	0%
13	BENCANA ALAM	0	0	0	0	0	0%	0	0%
14	BENCANA SOSIAL	0	0	0	0	0	0%	0	0%
15	BENCANA NON ALAM	0	0	0	0	0	0%	0	0%
JUMLAH		332	202	302	169	-30	-9%	-33	-16%

- d. Perbandingan jumlah Crime Index antara bulan *JANUARI 2019* dan *FEBRUARI 2019*, adalah sebagai berikut :

Tabel 4

NO	URAIAN	2019						TREN (%)			
		JANUARI 2019			FEBRUARI 2019			JTP	%	PTP	%
		JTP	PTP	%	JTP	PTP	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	CURAT	30	12	40%	35	17	49%	5	17%	5	42%
2	CURANMOR	32	10	31%	14	10	71%	-18	-56%	0	0%
3	CURAS	6	4	67%	9	2	22%	3	50%	-2	-50%
4	ANIRAT	4	1	25%	5	2	40%	1	25%	1	100%
5	KEBAKARAN	2	0	0%	0	1	0%	-2	-100%	1	0%
6	PEMBUNUHAN	0	0	0%	7	3	43%	7	0%	3	0%
7	PERKOSAAN	0	0	0%	1	1	100%	1	0%	1	0%
8	PENADAHAN	2	0	0%	0	1	0%	-2	-100%	1	0%
9	CUBIS	42	17	40%	38	16	42%	-4	-10%	-1	-6%
10	NARKOBA	42	47	112%	17	22	129%	-25	-60%	-25	-53%
11	TIPU/GELAP	11	4	36%	14	7	50%	3	27%	3	75%
	JUMLAH	171	95	56%	140	82	59%	-31	-18%	-13	-14%

e. Jumlah . . .

e. Jumlah Crime Index persatwil *FEBRUARI 2019*, adalah sebagai berikut

NO	URAIAN	POLDA		BRLG		TPI		KARIMUN		NATUNA		BINTAN		LINGGA		ANAMBAS		JLH		
		JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	JTP	PTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	CURAT			21	13	5	2	8	1			1	1					35	17	49%
2	CURANMOR			12	9	2	1											14	10	71%
3	CURAS			9	2													9	2	22%
4	ANIRAT			5	2													5	2	40%
5	KEBAKARAN			0	1													0	1	0%
6	PEMBUNUHAN			6	3	1	0											7	3	43%
7	PERKOSAAN							1	1									1	1	100%
8	PENADAHAN			0	1													0	1	0%
9	CUBIS	1	0	27	14	6	2					3	0	1	0			38	16	42%
10	NARKOBA	8	8			1	6	6	8			1	0			1	0	17	22	129%
11	TIPU/GELAP	0	1	14	6													14	7	50%
	JUMLAH	9	9	94	51	15	11	15	10	0	0	5	1	1	0	1	0	140	82	59%

1. POLEKSOSBUD . . .

1. POLEKSOSBUD

Perkembangan Gangguan Kamtibmas dari aspek Politik, ekonomi, sosial dan budaya periode **FEBRUARI 2019** di wilayah hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

Table - 1

NO	KESATUAN	URAIAN
1	2	3
1.	POLDA KEPRI DAN POLRES/TA JAJARAN	<p>1) AKSI DAMAI OLEH FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA(SFPMI) KAB.KARIMUN DALAM RANGKA HUT FSPMI KE-20 DI KANTOR DPRD KAB.KARIMUN DAN KANTOR BUPATI KARIMUN</p> <p>Pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 telah dilaksanakan Aksi damai oleh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)Kab.Karimun dalam rangka HUT FSPMI Ke-20 yang di pimpin oleh Ketua FSPMI Kab.Karimun Sdr.MUHAMMAD FAJAR.</p> <p>Adapun rangkaian kegiatan sbb :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pukul 09.00 Wib bertempat Jl.Simpang Mutiara Kec.Meral Kab.Karimun, massa FSPMI telah berkumpul dengan jumlah sekitar 80 orang, ranmor roda dua 80 unit dan ranmor roda empat 1 unit. b. Pukul 09.30 Wib Massa FSPMI bergeser menuju Kantor DPRD Kab.Karimun melalui Jl.Sei.Bati Kec.Tebing dengan pengawalan oleh mobil Patwal Sat.Lantas Polres Karimun. c. Pukul 10.00 Wib Massa FSPMI melaksanakan Orasi di depan Kantor DPRD Kab.Karimun jl.Canggih Putri Kec.Tebing yang di pimpin oleh Ketua FSPMI Sdr.Muhammad Fajar dengan menggunakan alat peraga Toa dan spanduk dengan tuntutan : <ol style="list-style-type: none"> 1) Sediakan Lapangan Kerja - Tolak PHK dan Pemagangan; 2) Tolak Upah Murah, Cabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupaha; 3) Perbaiki Sistem BPJS Kesehatan; 4) Tolak TKA terutama TKA Cina Unskil; 5) e Segera terbitkan Perda Ketenagakerjaan; 6) Segera bangun Balai Latihan Kerja (BLK); 7) Segera bahas dan tetapkan UMSK Kab. Karimun 2019; 8) Agar DPRD menghentikan sementara aktivitas PT. KDH hingga terselesaikannya

		<p>permasalahan karyawan PT. KDH.</p> <p>Pukul 10.30 Wib bertempat di gedung pertemuan DPRD Kab.Karimun telah di laksanakan mediasi yang di pimpin ketua DPRD Kab.Karimun Yusuf Sirad yang di damping Wakil DPRD Kab.Karimun Bakti Lubis, Kasat Bimas Polres Karimun Akp Eriman, KBO Sat.Intelkam Iptu Suprpto, Kanit III Sat.Intelkam Aipda Agus Safitra dan di hadiri oleh 15 orang perwakilan FSPMI.</p> <p>Adapun hasil rangkaian dialog sbb : Terkait permintaan karyawan ttng penyegehan dan penghentian kegiatan PT.KDH,pihak pemerintah karimun belum bisa membuat keputusan akan tetapi harus berkoordinasi dulu dengan instansi yang berwenang agar tidak terjadi salah langkah-langkah yang mengarah ranah hukum</p> <p>Pukul 15.00 Wib kegiatan pertemuan Dialog telah selesai di laksanakan selanjutnya massa FSPMI telah membubarkan diri ke rumahnya masing2, situasi terdapat dalam keadaan aman dan kondusif.</p> <p>2) AKSI UNJUK RASA OLEH KC FSPMI KOTA BATAM DI PEMKO BATAM</p> <p>Pada hari Rabu tgl 06 Februari 2019 sekira pukul 10.00 wib bertempat di depan Gedung Pemko Batam telah dilangsungkan aksi unjuk rasa oleh KC FSPMI Kota Batam.</p> <p>Adapun tuntutan massa KC FSPMI Kota Batam adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sediakan lapangan kerja-Tolak PHK dan pemagangan. b. Tolak upah murah, cabut PP 78/2015. c. Perbaiki kinerja BPJS Kesehatan. d. Regulasi Revolusi industri 4.0. e. Tolak TKA Cina unskill. f. Turunkan harga bahan pokok dan tarif dasar listrik / TDL. <p>Sekira Pukul 08.00 Wib sebelum pelaksanaan aksi unjuk rasa di depan gedung Pemko Batam, massa KC FSPMI Kota Batam berkumpul di Halte Panbil sebagai titik kumpul yg telah di tentukan dgn jumlah massa sebanyak +- 160 org.</p>
--	--	--

		<p>Sekira Pukul 11.45 Wib telah tiba massa KC FSPMI Kota Batam di depan gedung Pemko Batam dgn jumlah massa sebanyak +- 160 org dan langsung melakukan orasi yg berisi sbb : Hari ini ditahun 2019 ini kita memperingati ulang tahun FSPMI yang ke 20, Dihari ulang tahun FSPMI yang ke 20 ini kami menyampaikan yang menjadi tuntutan kami yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> Sediakan lapangan kerja-Tolak PHK dan pemagangan. Tolak upah murah, cabut PP 78/2015. Perbaiki kinerja BPJS Kesehatan. Regulasi Revolusi industri 4.0. Tolak TKA Cina unskill. Turunkan harga bahan pokok dan tarif dasar listrik / TDL. <p>Adapun alat peraga yg digunakan oleh KC FSPMI Kota Batam :</p> <ol style="list-style-type: none"> Mobil Komando Motor/R2 Mobil/R4 Bendera Serikat Ikat Kepala/lengan <p>Sekira pkl 14.50 Wib massa KC FSPMI Kota Batam membubarkan diri dengan aman dan tertib, Selama kegiatan berlangsung situasi aman dan terkendali.</p> <p>Catatan : Apabila Gubernur Kepri tidak menepati janjinya terkait penandatanganan UMSK paling lambat tanggal 8 Februari 2019, Buruh akan melaksanakan aksi unjuk rasa besar-besaran.</p> <p>3) GELAR PASUKAN DAN SIMULASI LANUD RHF DALAM RANGKA PENGAMANAN PEMILU PILPRES DAN PILEG TAHUN 2019 DI BANDARA RHF</p> <p>Pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 pukul 14.10 Wib bertempat di Bandara RHF dilaksanakan Apel Gelar Pasukan dan Simulasi dalam rangka pengamanan Pilpres dan Pileg Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Lanud RHF Tanjungpinang.</p> <p>Inspektur Upacara : Danlanud RHF Tanjungpinang Kolonel Pnb. Elistar Silaen*</p>
--	--	---

		<p>Komandan Upacara : Kapten Budio</p> <p>Susunan Pasukan Upacara :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Ton PHHb. Ton Tempurc. Ton AVSECd. Satpol PP (Massa Bulsit)e. Ton Kesehatan TNI AU <p>Hadir :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Walikota Tanjungpinang H. Syahrul, S.Pdb. Danlanud RHF Kolonel Pnb. Elistar Silaenc. Wadan wing 1 Tanjungpinang Letkol Bambangd. Kasdim 0315 / Bintang Mayor Czi Slamet Wahyudie. Palaksa Lanudal Tanjungpinang Mayor Harisf. KabagOps Polres Tanjungpinang Kopol Very Edefandria Norg. Kapolsek Bandara RHF diwakili Kanit Binmash. GM Angkasa Pura 2 Tanjungpinang Hotasi Manalui. GM Air Nave Tanjungpinang Muchis Sampurnaj. Kepala BMKG Tanjungpinang Dirahk. Undangan dan Personil 100 orang <p>Rangkaian Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Pukul 14.10 Wib dilaksanakan Upacara gelar Pasukan Pengamanan Pilpres dan Pileg 2019 Lanud RHF Tanjungpinang.b. Sambutan Danlanud RHF1) Upacara gelar pasukan dan simulasi dilaksanakan dalam rangka pengamanan Pelpres dan Pileg 2019 di Wilayah Kota Tanjungpinang.2) Kita harus maksimal dalam latihan simulasi ini agar kita dapat mengetahui apa-apa yang harus kita lalukan dalam penanggulangan aksi anarkis dan optimalkan koordimasi dengan satuan samping agar Pilpres dan Pilkada berjalan aman dan lancar. <p>Pukul 14.30 Wib Apel gelar pasukan selesai dan dilanjutkan dengan kegiatan simulasi dengan skenario sbb :</p>
--	--	--

		<p>Pengendalian aksi unras Personil Lanud RHF terhadap massa pendukung salah satu Pasangan calon Presiden yang tidak puas dan kontra terhadap salah satu Paslon lawan yg berkumpul di pintu gerbang Bandara Raja Haji Fisabilillah untuk melaksanakan kegiatan demonstrasi besifat damai mengutarakan rasa penolakan kunjungan kerja pendukung pasangan calon Presiden dari kubu lawan di Kepulauan Riau menggunakan pesawat Gagak Air Line via Bandara Raja Haji Fisabilillah.</p> <p>Pukul 15.00 Wib Latihan simulasi selesai dilaksanakan dan dilanjutkan dengan acara photo bersama ramah tamah, situasi aman dan terkendali.</p> <p>4) KEBAKARAN LAHAN KOSONG MILIK SAUDARA JOKO WIRATNO DI JALAN RAYA WISATA BAHARI KEL. KAWAL KEC. GUNUNG KIJANG</p> <p>Pukul 14.00 wib Anggota Piket Pelayanan Polsek Gunung Kijang yang sedang Melaksanakan Patroli R 2 Brigadir AGUNG NUZUL Melihat lahan kosong terbakar, Kebakaran lahan Kosong Milik Saudara JOKO WIRATNO yang bertempat di Jalan Wisata Bahari Kel. Kawal Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan. Berdasarkan informasi tsb, selanjutnya Piket Pelayanan Polsek Gunung Kijang menuju TKP dan menginfokan kepada UPT Damkar Kec. Toapaya. Saksi - saksi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Saudara SISWANTONO, 38 Tahun, Laki-Laki, Islam, Swasta , Perum Griya Mawadah Kelurahan Kawal Kec. Gunung Kijang. b. Saudara SYAIFUL BAHRI, 35 Tahun, Laki-Laki, Islam, Swasta, Kp. Sungai Enam Laut Kijang Kec. Bintan Timur. c. Saudara ZULKIFLI, 17 Tahun, Laki-Laki, Islam, Swasta, Kp. Sungai Enam Laut Kijang Kec. Bintan Timur. <p>Berdasarkan Kegiatan pulbaket di Lapangan didapatkan informasi bahwa pada pukul 13.45 WIB Api mulai membakar lahan kosong Milik Saudara JOKO WIRATNO yang bertempat di Jalan Wisata Bahari Kel. Kawal Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan dan penanggulangan kebakaran telah dilakukan oleh UPT Damkar Toapaya yang dibantu oleh Personil Polsek Gunung Kijang dan Masyarakat sekitar. Adapun luas lahan yang terbakar seluas \pm 2 Ha. Penyebab kebakaran hingga saat ini belum diketahui. Pada pukul 15.55 wib Api telah berhasil dipadamkan, korban jiwa dan materil nihil situasi dalam keadaan aman terkendali.</p>
--	--	--

2.		<p>5) AKSI UNJUK RASA OLEH ALIANSI SP/SB KOTA BATAM DI GRAHA KEPRI BATAM CENTER</p> <p>Pada hari Rabu tgl 13 Februari 2019 telah dilaksanakan aksi unjuk rasa oleh Aliansi SP/SB Kota Batam di Graha Kepri Batam Center - Kota Batam untuk menuntut Gubernur Kepri agar segera menerbitkan SK UMS Kota Batam tahun 2019 dgn rincian sbb :</p> <p>Pukul 08.00 Wib bertempat di halaman depan Graha Kepri telah dilaksanakan apel persiapan pengamanan yg dipimpin oleh Kabag Ops Polresta Barelang beserta per pengamanan dr Polresta Barelang, Dit Samapta Polda Kepri, Dit Lantas Polda Kepri dan Sat Brimobda Polda Kepri dgn kuat pers sebanyak +- 360 Personil.</p> <p>Pukul 15.00 Wib telah berkumpul massa dari SP/SB buruh Kota Batam di titik kumpul Halte Panbil Mall Muka Kuning Sungai Beduk Kota Batam sebanyak +- 500 Orang (FSPMI sebanyak + 400 org dan DPC LEM SPSI sebanyak +- 100 org), massa dikoordinatori oleh Sdr. Suprpto (Pangkorda Garda Metal)</p> <p>Pukul 15.55 Wib massa bergerak menuju kantor Graha Kepri Batam Kota-Kota Batam dgn menggunakan 1 unit mobil Komando BP 8120 ZN, 1 Unit mobil SP LEM SPSI BP 1023 GR dan 200 unit sepeda motor, massa juga membawa alat peraga berupa Sound Sistem, Bendera merah putih, Bendera SPSI dan Bendera FSPMI, pergerakan massa dikawal menggunakan mobil Patroli Sat Lantas Poltresta Barelang</p> <p>Pukul 16.48 Wib telah tiba massa dr Aliansi SP/SB Kota Batam di Graha Kepri sebanyak +- 600 org. Setibanya di lokasi aksi massa langsung melakukan orasi dgn rincian sbb :</p> <p>a. Sdr. Rizal (KC FSPMI) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hari ini kawasan industri pindah ke Graha Kepri 2) Terimakasih kepada seluruh pekerja/buruh yg telah hadir pada aksi unjuk rasa hari ini 3) Pada aksi sebelumnya Gubernur Kepri melaluo asisten 1 menyatakam bahwa paling lambat tgl 08 Februari 2019 SK UMS Kota Batam akan diterbitkan, namun sampai saat ini hal itu tdk diwujudkan 4) Gubernur Kepri telah membohongi pekerja/buruh di Kota Batam 5) Jika perkataan pemimpin tdk dapat dipercaya maka beliau tdk cocok memimpin di Kepri khususnya Batam
----	--	---

		<p>6) Jika hari ini Gubernur Kepri tdk menerbitkan SK UMS Kota Batam maka kita buruh/pekerja akan memaksa masuk dan menginap di Graha Kepri sampai Gubernur Kepri menandatangani SK UMS Kota Batam tahun 2019</p> <p>7) Hari ini buruh/pekerja rela tdk pulang karena menuntut hak kita sebagai buruh</p> <p>8) Kita akan berjuang sampai tuntutan kita dikabulkan</p> <p>9) Hari ini kita harus total agar SK UMSK dikeluarkan bulan januari</p> <p>10) Sebelumnya SK UMSK diterbitkan setelah lebaran</p> <p>11) Ada indikasi bahwa SK UMSK saat ini juga akan diterbitkan setelah lebaran</p> <p>12) Kita harus siap mati untuk memperjuangkan hak-hak kita</p> <p>13) Jika masalah perut maka apapun halangan kita akan kita hadapi</p> <p>b. Sdr. Ramon (KC FSPMI) :</p> <p>1) Sesuai aturan aksi unjuk rasa sampai jam 18.00 Wib dan Polisi akan membubarkan kita</p> <p>2) Hari ini yg ada didalam Graha Kepri hanya Tagor Napitupulu</p> <p>3) Para pimpinan SP/SB Kota Batam jangan mai berjumpa dgn dia, jika perlu ludahi saja mukanya</p> <p>4) Hari ini kita hanya mau bertemu Gubernur Kepri utk menerbitkan SK UMS Kota Batam dan kita tdk akan mau berjumpa dgn perwakilan lainnya</p> <p>5) Sore ini komando ada diatas mobil komando, jika instruksi tetap bertahan maka kita akan tetap bertahan</p> <p>c. Sdr. Samdana Ginting (DPC F LOMENIK SBSI) :</p> <p>1) Sudah berapa kali kita datang ke sini namun tdk mendapatkam hasil</p> <p>2) Janji asisten satu hanya utk menghina kita</p> <p>3) Kita semua akan duduk didepan Graha Kepri sampai Gubernur Kepri menerbitkan SK UMS Kota Batam</p> <p>4) Hari ini kita akan aksi tidur di jalan agar Gubernur tahu perjuangan kita</p> <p>d. Sdri. Tuti (PCEE FSPMI) :</p> <p>1) Terimakasih kpd pihak Kepolisian yg telah mengamankan kami</p> <p>2) Hari ini kami akan aksi damai namun tidak tahu utk aksi besok</p> <p>3) Kita akan bertahan disini sampai Gubernur Kepri menandatangani SK UMS Kota Batam</p> <p>e. Sdr. Alfitoni (Ketua KC FSPMI) :</p>
--	--	---

		<ol style="list-style-type: none"> 1) Aksi itu batas waktunya pukul 18.00 Wib dan jika kita tidak bubar maka kita akan mandi disini 2) Sepertinya Pemerintah Prov. Kepri yg ingin membuat Batam hancur 3) Upah yg sudah dirundingkan dan sesuai proses ada saja alasan utk diundur 4) Kita ingin Batam aman namun sepertinya pemerintah ingin membuat kita menciptakan Batam tidak aman 5) SK UMSK hanya bisa ditandatangani oleh Gubernur Kepri 6) Hari ini kita tdk akan masuk kedalam 7) Gubernur Kepri akan mengundang Aliansi SP/SB Kota Batam bersama FKPD Prov. Kepri pada hari jumat 8) Kita akan bertahan disini sampai Gubernur menerbitkan SK UMS Kota Batam <p>Pukul 19.00 Wib, Kapolresta Bareleng bersama Kasat Intelkam dan Kasat Sabhara Polresta Bareleng menjumpai para ketua SP/SB Kota Batam untuk menyampaikam sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kami dr pihak Kepolisian selalu mendukung Aliansi SP/SB Kota Batam b. Pihak Kepolisian juga sudah melakukan upaya-upaya utk dapat memfasilitasi pertemuan antara Aliansi SP/SB Kota Batam dgn Pemerimtah Prov. Kepri c. Terkait hasil dr permasalahan UMS Kota Batam itu bukan ranah Kepolisian dimana tugas Kepolisian adalah menjaga Keamanan di Kota Batam d. Berdasarkan UU No. 09 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat Dimuka Umum dinyatakan bahwa *Pelaksanaan aksi unjuk rasa adalah pkl 06.00 s/d 18.00 Wib e. Saat ini Gubernur Kepri sedang berada diluar Kota dan hanya Kadisnaker Prov. Kepri dan Kadisnaker Kota Batam f. Kami juga menghimbau agar perwakilan dr Aliansi SP/SB Kota Batam utk hadir dalam pertemuan dgn Gubernur Kepri dan FKPD Prov. Kepri pada hari jumat tgl 15 Februari 2019 g. Buruh tetap bertahan disini juga tdk menemui hasil karena Gubernur Kepri tdk berada disini h. Silahkan Aliansi SP/SB Kota Batam melanjutkan aksinya pada hari Kamis tgl 14 Februari 2019 i. Aksi ini sudah melewati jam pelaksanaan dan sudah mengganggu penngguna jalan lain serta masyarakat lainnya j. Kami dari Kepolisian tdk mungkin membiarkan aksi berlanjut terus karena tdk sesuai dgn UU No. 09 Tahun 1998 sehingga kami menghimbau dan mengajak agar Ketua SP/SB Kota Batam dapat membubarkan diri dgn aman dan tertib
--	--	--

		<p>Pukul 19.20 Wib Ketua masing2 Serikat SP/SB Kota Batam melaksanakan rapat internal di dalam mobil komando terkait arahan dr Kapolresta Barelang dengan hasil bahwa buruh masih akan bertahan</p> <p>Pukul 20.00 Wib massa dr FSP LEM SPSI, DPC F LOMENIK SBSI dan TSK SPSI membubarkan diri namun masih tersisa massa sebanyak +- 70 org dari massa KC FSPMI dan Garda Metal yg masih akan bertahan dilokasi aksi</p> <p>Pukul 23.10 Wib telah dilakukan rapat internal oleh KC FSPMI dan Garda Metal dengan hasil sbb :</p> <ol style="list-style-type: none">Massa dr KC FSPMI dan Garda Metal telah sepakat utk membubarkan diri dengan aman dan tertibAliansi SP/SB Kota Batam membatalkan aksi pada hari Kamis tgl 14 Februari 2019Aliansi SP/SB Kota Batam akan melakukan pengawalan pada pertemuan hari Jumat tgl 15 Februari di Graha Kepri dgn jumlah massa +- 20 org <p>Pukul 23.20 Wib massa dr Aliansi SP/SB Kota Batam membubarkan diri dengan aman dan tertib.</p> <p>Selama kegiatan aksi unjuk rasa telah dilakukan pengamanan terbuka dan tertutup oleh Polresta Barelang, Dit Samapta Polda Kepri dan Sat Brimobda Polda Kepri</p> <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none">Aliansi SP/SB Kota Batam membatalkan aksi unjuk rasa pada hari Kamis tgl 14 Februari 2019 di Graha KepriAliansi SP/SB Kota Batam akan melakukan pengawalan pada rapat pertemuan Gubernur Kepri dengan FKPD Prov. Kepri dan perwakilan Aliansi SP/SB Kota Batam dgn jumlah massa sebanyak +- 20 orgSat Sabhara Polresta Barelang utk tetap menyiagakan personil di Graha Kepri utkantisipasi adanya aksi oleh Aliansi SP/SB Kota Batam pada hari kamis tgl 14 Februari 2019 Polsek Jajaran melalukam patroli utkantisipasi adanya massa buruh yg berkumpul utk tetap melaksanakan aksi.
--	--	---

		<p>6) AKSI DAMAI DEKLARASI PEMILU DAMAI OLEH GABUNGAN MAHASISWA DARI PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) KEPRI, PMII TGPINANG-BINTAN, GMNI DAN IMM DI KTR BAWASLU DAN KPU PROV KEPRI</p> <p>Pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 telah berlangsung aksi damai Deklarasi Pemilu Damai oleh gabungan dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kepri, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Kantor Bawaslu Provinsi Kepri dan Kantor KPU Provinsi Kepri dengan Kordum : Sdr. Baginda Brata (PMII Kepri) dan Korlap : Sdr. Muhammad Fuad (PMII Kepri).</p> <p>Alat Peraga :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bendera b. Sound System c. Mobil Komando d. Spanduk yang bertuliskan : <ol style="list-style-type: none"> 1) Mahasiswa dan Pemuda Kepri Melawan Hoax Politisasi Sara dan Menebar Kebencian #JAGAHATIJAGANKRI #2019AMANDAMAI #AYOPERANGIHOAX 2) Petisi Aksi Dukungan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Kepri #AMAN #DAMAI #SEJUK 3) Aksi Damai Mahasiswa dan Pemuda Kepulauan Riau Menolak Tegas Berita Hoax, Sara, Ujaran Kebencian #KITA_SEMUA_BERSAUDARA #HIDUPBERSAMAHARUSDIJAGA <p>Pukul 11.45 Wib kegiatan telah selesai, massa membubarkan diri dengan tertib. Situasi aman dan terkendali.</p>
3.		<p>7) AKSI DAMAI OLEH ALIANSI PEDULI PULAU BINTAN DI KANTOR GUBERNUR PROV KEPRI</p> <p>Pukul 09.30 s/d 14.30 wib di Kantor Gubernur Prov Kepri telah dilaksanakan kegiatan aksi damai oleh Aliansi Peduli Pulau Bintang terkait Perizinan dan Pengawasan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perihal Pertambangan Bauksit yang ada di Kabupaten Bintang. Aliansi Peduli Pulau Bintang terdiri dari DPP GAN KEPRI, Hulubalang LAM Bintang, Gagak Hitam Bintang dan Tanjungpinang, DPD LAMI Kepri, LAPAK dan KNTI Bintang. Adapun jumlah massa sebanyak ± 25 orang,:</p>

		<p>Alat Peraga :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Toa / pengeras suara b. Bendera, dan c. Spanduk : <ol style="list-style-type: none"> 1) Stop Penambangan Ilegal 2) Situs Sejarah dan Makam harus dilindungi. 3) Tindakan tegas oknum dan mafia tambang <p>Penyampaian orasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Adanya pertambangan yang dilakukan di Kabupaten Bintan sangat meresahkan masyarakat, hal tersebut berdampak buruk terhadap masyarakat dan lingkungannya. b. Pertambangan yang ada di Kabupaten Bintan merupakan praktik pertambangan ilegal yang mana tidak mengantongi izin namun Pemprov hanya mengeluarkan ijin Operasi Produksi untuk Penjualan (IUP OP) yang sifatnya hanya menjual bukan eksploitasi/menggali. c. Maka dari itu kami meminta kejelasan atas ijin yang diberikan terhadap praktik pertambangan tersebut. Fakta dilapangan yang terjadi ialah penambangan tersebut dilakukan di kawasan hutan lindung bahkan lebih parahnya lagi dilakukan di pemakaman/perkuburan. d. Apakah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sudah mensejahterakan masyarakat Kepri, jika belum jangan merusak bumi Bintan dengan adanya pertambangan bauksit yang ilegal yang tidak sesuai perzinannya. e. Kami akan pulang apabila kami mendapat jawaban yang memuaskan dari Instansi terkait, kami juga meminta pihak Kepolisian, Pemerintah Provinsi Kepri untuk menindak tegas pengusaha - pengusaha penambang ilegal. <p>Pukul 10.50 wib massa melakukan Audiensi dengan pihak Pemerintah Provinsi Kepri di ruang Rapat Sekda Lt. 3. Hadir :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas ESDM Prov Kepri DR. Amajon, M. Pd b. Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov Kepri Yeri Suparna c. Kepala Dinas PTSP Provinsi Kepri Syamsuardi d. Kasat Pol PP Prov Kepri Subandi <p>Pukul 12.35 wib Audiensi dilanjutkan kembali dengan agenda Pembahasan dan penandatanganan</p>
--	--	---

Nota Kesepakatan.

Atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Selama kegiatan berlangsung situasi terdapat dalam keadaan aman dan terkendali.

8) AKSI UNJUK RASA 93 GURU HONORER (K2) DI KANTOR WALIKOTA BATAM

Pukul 09.00 s/d 13.30 Wib telah tiba massa dari 93 Guru Honorer (K2) yg ikut tes CPNS tahun 2013 sebanyak \pm 20 org dgn Kordum : Sdri. Etika, S. Pd utk menuntut Agar Walikota Batam segera menerbitkan SK CPNS kami yg telah dinyatakan lulus oleh Panselnas dan mengembalikan hak-hak kami sebagai CPNS. Sekira pkl 09.40 Wib bertempat di depan Asrama Haji telah berkumpul massa dari guru honorer (K2) sebanyak 20 orang. Setibanya massa di kantor Walikota Batam langsung melakukan aksi unjuk rasa dan menyampaikan orasinya dgn rincian :

a. Sdr. Dewa Rastama :

- 1) Rekan-rekan kami yg lain tdk bisa turun ke jalan dikarenakan adanya intimidasi dr Pemerintah
- 2) Jangan kami di zolimi sebagai guru
- 3) Bagaimana guru bisa tenang jika kami selalu tdk diperdulikan
- 4) Kami hanya meminta hak kami sebagai CPNS
- 5) Sudah 6 tahun kami menunggu janji yg tdk kunjung diwujudkan
- 6) BKN sudah menyatakan lulus namun sampai saat ini belum ada kepastian
- 7) Kami selalu di oper2 terkait tuntutan kami

b. Sdri. Atik :

c. Sekira pkl 10.50 Wib telah dilakukan pertemuan antara perwakilan Guru Honorer (K2) dgn Perwakilan Pemko Batam. Adapun yang hadir :

Adapun isi dari pamflet yg digunakan selama aksi sbb :

- a. Keluarkan NIP Kami
- b. Jangan berkelit dan jangan persulit lagi, kami disini hanya menuntut hak kami sudah dinyatakan lulus
- c. Jangan tutup mata dengan keberadaan kami, mana keadilan, jangan zolimi guru

		<p>d. Mana janji manismu utk menyelesaikan honorer K2 yg lulus, tapi hingga 6 tahun kau gantung tanpa kepastian</p> <p>e. Apakah sosok pemimpin yg ingkar janji dan tak mau mendengar aspirasi bahkan suka menebar ancaman yang patut kita pilih dan pertahankan</p> <p>f. Kami tdk mau P3K, kami mau PNS, keluarkan NIP kami, berikan hak kami</p> <p>g. Pak Rudi penuh janji, mana janji bapak akan bantu kami jadi PNS</p> <p>h. Jangan biarkan kami seolah mengemis untuk hak kami, bukan dgn cara ini memajukan pendidikan, kemana hukum dan keadilan di Negeri ini, Allah tidak tidur.</p> <p>i. Terbitkam segera SK kami, berhenti memperlakukan nasib kami, berikan keadilan kepada kami, jangan pura – pura tuli.</p> <p>Selama kegiatan berlangsung situasi terdapat dalam keadaan aman dan terkendali.</p> <p>9) AKSI DAMAI OLEH ALIANSI PEDULI PULAU BINTAN DI KANTOR GUBERNUR PROV KEPRI</p> <p>Pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 pukul 09.30 wib di Kantor Gubernur Prov Kepri telah dilaksanakan kegiatan aksi damai oleh Aliansi Peduli Pulau Bintang terkait Perizinan dan Pengawasan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perihal Pertambangan Bauksit yang ada di Kabupaten Bintang. Aliansi Peduli Pulau Bintang terdiri dari DPP GAN KEPRI, Hulubalang LAM Bintang, Gagak Hitam Bintang dan Tanjungpinang, DPD LAMI Kepri, LAPAK dan KNTI Bintang.</p> <p>*Rangkaian :*</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pukul 09.15 wib massa sebanyak - + 25 orang berkumpul di Jembatan Ramayana dan menerima arahan dari Kordum Sdr. Juandi. 2. Pukul 09.55 wib massa sebanyak - + 25 orang bergerak menuju Kantor Gubernur Provinsi Kepri menggunakan 4 (empat) R4 dengan Pengawalan Sat Lantas Polres Tanjungpinang. 3. Pukul 10.10 wib massa dari Aliansi Peduli Pulau Bintang tiba di Kantor Gubernur Provinsi Kepri dan langsung melakukan orasi. <p>*Penyampaian orasi :*</p>
--	--	--

		<p>a. Adanya pertambangan yang dilakukan di Kabupaten Bintan sangat meresahkan masyarakat, hal tersebut berdampak buruk terhadap masyarakat dan lingkungannya.</p> <p>b. Pertambangan yang ada di Kabupaten Bintan merupakan praktik pertambangan ilegal yang mana tidak mengantongi izin namun Pemprov hanya mengeluarkan ijin Operasi Produksi untuk Penjualan (IUP OP) yang sifatnya hanya menjual bukan eksploitasi/menggali.</p> <p>c. Maka dari itu kami meminta kejelasan atas ijin yang diberikan terhadap praktik pertambangan tersebut. Fakta dilapangan yang terjadi ialah penambangan tersebut dilakukan di kawasan hutan lindung bahkan lebih parahnya lagi dilakukan di pemakaman/perkuburan.</p> <p>d. Apakah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sudah mensejahterakan masyarakat Kepri, jika belum jangan merusak bumi Bintan dengan adanya pertambangan bauksit yang ilegal yang tidak sesuai perzinannya.</p> <p>e. Kami akan pulang apabila kami mendapat jawaban yang memuaskan dari Instansi terkait, kami juga meminta pihak Kepolisian, Pemerintah Provinsi Kepri untuk menindak tegas pengusaha - pengusaha penambang ilegal.</p> <p>Pukul 14.30 wib giat selesai situasi aman dan terkendali.</p> <p>10) PERTEMUAN ANTARA KAPOLRES BINTAN DENGAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNCHR) TERKAIT PENANGANAN DAN PENGAWASAN PENGUNGSI</p> <p>Pukul 11.12 s/d 12.20 wib di Ruang Pertemuan Kapolres Bintan telah dilaksanakan Pertemuan antara Kapolres Bintan dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) terkait Penanganan dan Pengawasan pengungsi di Community House Badra Resort Kawal Kec. Gunung Kijang yang dihadiri oleh Wakapolres Bintan, Thomas Vargas (Representative UNCHR), Franky Lukitama (Senior Protection UNCHR), Kopol Ade Siregar, Danyon B Pelopor Satbrimobda Kepri, Dan Satrad 213 Bintan dan Kasat Intelkam Polres Bintan.</p> <p>a. Thomas Vargas (Representative UNCHR) menyampaikan : Maksud tujuan UNCHR dalam kunjungan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penanganan pengungsi di Community</p>
--	--	--

		<p>House yang berada di Kabupaten Bintan.</p> <p>b. Kapolres Bintan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Didalam Perpres Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri bahwa terdapat 3 Instansi yang melaksanakan yaitu Pemkab Bintan sebagai Steakholder, Imrgasi Bintan sebagai Pengawasan dan Polres Bintan sebagai Penanganan Konflik yang mana selama ini telah dilaksanakan sebagaimana fungsinya masing-masing. 2) Berbagai permasalahan yang terjadi selama pengungsi berada di Community House dapat ditangani dengan sebaik-baiknya guna menghindari konflik dengan masyarakat setempat. 3) Polres Bintan juga akan memfasilitasi UNCHR untuk melaksanakan pertemuan dengan Pemkab agar dapat dibentuk Satgas dan membuat sebuah sistim pengawasan. 4) Selanjutnya Polres Bintan juga akan memfasilitasi untuk dilaksanakan sosial antara Refugee dengan Masyarakat lokal. <p>c. Thomas Vargas (Representative UNCHR) selanjutnya menyampaikan tanggapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) UNCHR akan memfasilitasi dengan Pemkab dalam rangka membentuk suatu Satgas yang bertujuan untuk melaksanakan penanganan konflik secara maksimal. 2) UNCHR juga akan mendorong Polri dalam hal ini Polres Bintan dalam penanganan konflik yang terjadi dan akan mendorong Steakholder untuk dapat duduk bersama guna membuay sistim dan membentuk sebuah Satgas penanganan. <p>Selanjutnya UNCHR memberikan cinder mata kepada Kapolres Bintan dan dilaksanakan foto bersama.</p> <p>11) AKSI UNJUK RASA OLEH HMI TANJUNGPINANG - BINTAN DI POLRES TANJUNGPINANG</p> <p>Pukul 13.30 wib di Mapolres Tanjungpinang dilaksanakan Aksi Damai oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Tanjungpinang - Bintan terkait pemuatan foto Presiden RI pada Spanduk dan Baliho kegiatan Milenial Road Safety Festival (MRSF) dengan jumlah massa sebanyak 13 orang dengan Korlap Sdr. Febriyadi. Dalam aksinya massa menggunakan alat peraga berupa Toa, Bendera HMI serta Spanduk bertuliskan Lepas photo Jokowi (Capres) demi jaga kepercayaan terhadap Kepolisian, HMI - Netral Independen Kepolisian harus Independen.</p>
--	--	--

		<p>Sebelum melaksanakan aksinya, Pukul 13.30 s/d 13.35 Wib massa dari HMI Tanjungpinang-Bintan yang di koordinatori oleh Sdr. Febriyadi berkumpul di Masjid Marhamah Jl. A. Yani depan Mapolres Tg. Pinang menuju Gerbang Mako Polres Tg. Pinang kemudian melakukan orasi di depan Gerbang Polres Tanjungpinang.</p> <p>a. Kapolres Tanjungpinang</p> <ol style="list-style-type: none">1) Sampai saat ini kami meyakini bahwa kegiatan tersebut adalah demi kemanusiaan, hal tersebut yang menjadi landasan Polri untuk melaksanakan kegiatan MRSF.2) Keselamatan di jalan raya adalah Program dan tanggung jawab Pemerintah sehingga perlu rekan - rekan pahami, maka dari itu yang menjadi icon kegiatan teraebut adalah Bapak Ir. Jokowi sebagai Kepala Pemerintahan RI saat ini.3) Sisi pokok yang kami ambil untuk bekerja adalah sisi keselamatan demi kemanusiaan.4) Terkait foto Presiden RI di spanduk MRSF, perlu diketahui bahwa rencana kegiatan tersebut adalah program Nasional yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, bukan hanya di Kota Tanjungpinang. <p>Pukul 15.10 wib giat selesai situasi aman dan terkendali.</p>
--	--	---

f. Laka Lintas dan Langgar lintas

- a. Perkembangan Gangguan Kamtibmas khususnya Laka Lintas Bulan *JANUARI 2019* dan *FEBRUARI 2019* dapat digambarkan sebagai berikut:

URAIAN	B U L A N						TREN (%)	
	JAN 2019			FEB 2019				
	L	S	%	L	S	%		
L A K A	76	3	395%	66	0	0	-10	-3
M D	21			7			-14	-67%
L B	25			13			-12	-48%
L R	95			84			-11	-12%
RUGI MAT	188.900.000			151.700.000			-37.200.000	

- b. Perkembangan Gangguan Kamtibmas khususnya Pelanggaran lalu lintas Bulan *JANUARI 2019* dan *FEBRUARI 2019* dapat digambarkan sebagai berikut:

URAIAN	B U L A N						TREN	
	JAN 2019			FEB 2019				
	L	S	%	L	S	%		
GAR	2543	2019	79%	2516	1878	75%	-27	-141

- c. Perkembangan Gangguan Kamtibmas khususnya Tabrak Lari Bulan *JANUARI 2019* dan *FEBRUARI 2019* dapat digambarkan sebagai berikut:

URAIAN	B U L A N						TREN (%)	
	JAN 2019			FEB 2019				
	L	S	%	L	S	%		
TABRAK LARI	3	0	0	15	0	0	12	0%
M D	1			0			-1	-1%
L B	0			0			0	0%
L R	2			17			15	750%
RUGI MAT	2.000.000			17.600.000			15.600.000	

III. KASUS MENONJOL

NO	WAKTU	TEMPAT	JENIS KEJADIAN	URAIAN KEJADIAN	KERUGIAN				TINJUT
					MD	LB	LR	MATERI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									

IV. ANALISA DAN EVALUASI...

IV. ANALISA DAN EVALUASI

1. Berdasarkan fakta-fakta dari data jumlah Gangguan Kamtibmas yang terjadi di wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau berikut jajarannya selama kurun waktu bulan *FEBRUARI 2019* dibandingkan bulan *JANUARI 2019* yang meliputi kejahatan Konvensional, Transnasional, Terhadap Kekayaan Negara, Berimplikasi Kontijensi, Pelanggaran HAM, Pelanggaran hukum non pidana, pelanggaran hukum pidana, gangguan terhadap orang, gangguan terhadap barang, gangguan terhadap sarana dan fasilitas, gangguan terhadap hewan, gangguan terhadap lingkungan hidup, bencana alam, bencana sosial dan bencana non alam dievaluasi sebagai berikut :

- a. Trend Perkembangan Tindak Pidana.

Dilihat dari data perkembangan Situasi Gangguan Kamtibmas yang terjadi di wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dan jajarannya pada Bulan *FEBRUARI 2019* dibandingkan dengan bulan *JANUARI 2019* :

- 1) Kasus kejahatan Konvensional mengalami *KENAIKAN* sebesar 13 kasus atau 6 % (227 kasus di bulan *FEBRUARI 2019* dan 214 kasus di bulan *JANUARI 2019*);
- 2) Untuk kasus kejahatan Trans nasional mengalami *PENURUNAN* sebesar -24 kasus atau -56% (19 kasus di bulan *FEBRUARI 2019* dan 43 kasus di bulan *JANUARI 2019*);
- 3) Untuk kasus kejahatan terhadap Kekayaan Negara mengalami *KENAIKAN* kasus 4 kasus atau 133% (7 kasus di bulan *FEBRUARI 2019* dan 3 kasus di bulan *JANUARI 2019*);
- 4) Sedangkan untuk kasus kejahatan yang berimplikasi kontinjensi tidak mengalami kenaikan atau penurunan (tetap) sebesar 0%;
- 5) Kasus kejahatan Pelanggaran HAM mengalami *PENURUNAN* sebesar -10 kasus atau -50% (10 kasus di bulan *FEBRUARI 2019* dan 20 kasus di bulan *JANUARI 2019*);
- 6) Untuk kasus kejahatan Pelanggaran hukum Non Pidana, tidak mengalami kenaikan atau penurunan (tetap) sebesar 0%;
- 7) Untuk kasus kejahatan Pelanggaran hukum pidana mengalami *PENURUNAN* sebesar -18 kasus atau -45 % (22 kasus di bulan *FEBRUARI 2019* dan 40 kasus di bulan *JANUARI 2019*);
- 8) Dan untuk kasus kejahatan Gangguan terhadap Orang mengalami *KENAIKAN* kasus sebesar 5 kasus atau 42 % (17 kasus di bulan *FEBRUARI 2019* dan 12 kasus di bulan *JANUARI 2019*);
- 9) Untuk kasus kejahatan Gangguan terhadap barang tidak mengalami kenaikan atau penurunan (tetap) sebesar 0%;
- 10) Untuk kasus kejahatan Gangguan terhadap sarana dan fasilitas tidak mengalami kenaikan atau penurunan (tetap) sebesar 0%;
- 11) Untuk kasus kejahatan Gangguan terhadap hewan tidak mengalami kenaikan atau penurunan (tetap) sebesar 0%;

12) Sedangkan...

- 12) Sedangkan untuk kasus kejahatan Gangguan terhadap lingkungan hidup tidak mengalami kenaikan atau penurunan (tetap) sebesar 0%;
- 13) Untuk kasus Bencana alam tidak mengalami kenaikan atau penurunan (tetap) sebesar 0%;
- 14) Untuk kasus Bencana sosial tidak mengalami kenaikan atau penurunan (tetap) sebesar 0%;
- 15) Untuk kasus Bencana non alam tidak mengalami kenaikan atau penurunan (tetap) sebesar 0%;
- 16) Perbandingan kasus Crime Indeks Bulan *FEBRUARI 2019* dibandingkan dengan Bulan *JANUARI 2019* mengalami *PENURUNAN* sebesar -31 kasus atau -18% (140 kasus bulan *FEBRUARI 2019* dan 171 kasus di bulan *JANUARI 2019*).

b. Trend Perkembangan Kasus Laka Lantas dan Pelanggaran Lantas.

Perbandingan gangguan Kamtibmas Khususnya dibidang Lalu Lintas dilihat dari perbandingan antara bulan *FEBRUARI 2019* dan *JANUARI 2019* :

- 1) Jumlah laka lantas mengalami *PENURUNAN* yaitu -10 kasus atau -62% (66 kasus LAKA LANTAS bulan *FEBRUARI 2019* dan 76 kasus LAKA LANTAS di bulan *JANUARI 2019*);
- 2) Kasus Laka MD mengalami *PENURUNAN* yaitu -14 kasus atau -67 % (7 kasus MD bulan *FEBRUARI 2019* dan 21 kasus MD di bulan *JANUARI 2019*);
- 3) Sedangkan untuk laka LB mengalami *PENURUNAN* sebesar -12 kasus atau -48% (13 kasus di bulan *FEBRUARI 2019* menjadi 25 kasus di bulan *JANUARI 2019*);
- 4) Untuk LR mengalami *PENURUNAN* yaitu -11 kasus atau -12 % (84 kasus LR bulan *FEBRUARI 2019* dan 95 kasus LR di bulan *JANUARI 2019*);
- 5) Perbandingan jumlah Pelanggaran mengalami *PENURUNAN* sebesar -27 kasus atau 2% (2516 GAR bulan *FEBRUARI 2019* dan 2543 GAR bulan *JANUARI 2019*);
- 6) Perbandingan jumlah tabrak lari mengalami *KENAIKAN* sebesar 12 kasus atau 400% (15 kasus bulan *FEBRUARI 2019* dan 3 kasus bulan *JANUARI 2019*);

V. PENUTUP

Demikian laporan gangguan Kamtibmas yang terjadi di wilayah Kepolisian Daerah Kepulauan Riau bulan *FEBRUARI 2019* ini dibuat, semoga dapat dijadikan atensi untuk mengantisipasi Gangguan Kamtibmas yang terjadi dimasa yang akan datang serta sebagai bahan masukan bagi pimpinan dalam menentukan langkah kebijaksanaan selanjutnya.

BATAM, Maret 2019
KEPALA BIRO OPERASI KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU



YERRY OSKAG, S.I.K.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 68030331